PUPR BPPW NTB
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KOTA MATARAM

PROGRAM KOTAKU | KOTA TANPA KUMUH

NEWSLETTER

EDISI III TRIWULAN II TAHUN 2021

PADAT KARYA TUNAI
MENJAWAB DAMPAK PELEMAHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI

INDEX BERITA :

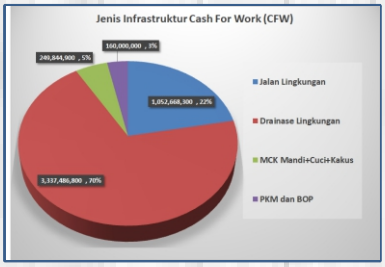

Hal. 2 : Capaian Progres Pelaksanaan Kegiatan *Cash For Work (CFW)* Tahun 2021

Hal. 3 : Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pemantauan Dampak Sosial dan Dampak Lingkungan Kegiatan CFW

Hal. 4 : Monitoring Pemda Ke Lokasi Kegiatan CFW Kotaku Mataram

Hal. 5 : Giat Forum PKP Kota Mataram yang Menggeliat

Hal. 8 : Konsep Desain Penataan Skala Kawasan Pasca Bencana Kota Mataram

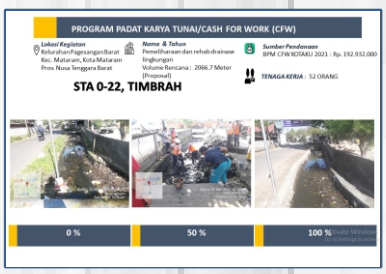

Hal. 9 : Galeri Foto Dokumentasi *Best Practice* Kegiatan *Cash For Work (CFW)*

Hal. 6 : Mewujudkan Kota Inklusif Melalui Program KOTAKU-DFAT

Hal. 7 : Penandatangan Kontrak (SPK) Program KOTAKU-DFAT Antara PPK Dengan BKM

ALBUM FOTO KEGIATAN CFW UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

EDITORIAL

Edisi Ketiga Triwulan Kedua Newsletter Kotaku Mataram ini akan menyajikan Capaian Progres Pelaksanaan Kegiatan CFW, Persiapan Pelaksanaan Kegiatan DFAT, hingga Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana dan banyak lagi yang lainnya. Newsletter ini menjadi media sosialisasi dan penyebaran informasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Mataram yang tentunya diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh tentang pelaksanaan Program Kotaku baik di tingkat pelaku dan terlebih bagi Pemda. Tentunya banyak kekurangan dalam penyajiannya, maka saran, masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan agar ke depannya lebih baik lagi.

Tim Redaksi : Tim Korkot Cluster 1 Kota Mataram
Alamat : Jl. Danau Maninjau I No. 12 Griya Pagutan Permai - Mataram

Kotaku_Mataram | Kotaku-Mataram | Kotaku Mataram | Kotaku.korkotmataram@gmail.com

Capaian Progres Pelaksanaan Kegiatan *Cash For Work (CFW)* Tahun 2021

Terlaksananya Kegiatan *Cash For Work (CFW)* Program Kotaku di Kota Mataram dalam rangka menjawab dampak pandemi Covid-19 dengan pendekatan Padat Karya dalam pelaksanaannya. Berbicara padat karya tentunya tidak terlepas dari Instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 . Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, dimana selama pandemi begitu banyak para pekerja yang di PHK, kehilangan usaha bahkan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan pelaksanaan Kegiatan *Cash For Work (CFW)* di 16 Kelurahan lokasi CFW yang tersebar di Kota Mataram, setidaknya mampu menyerap sedikitnya 1.200 orang tenaga kerja dengan ± 108.000 HOK yang dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai. Sejak diawali kegiatan CFW ini di Bulan Apri, hingga periode akhir Bulan Juni ini capaian progres fisik dan keuangannya telah mencapai 100%, tinggal penyelesaian LPJ oleh KSM sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah dikelola

Kriteria Pemanfaat Sebagai Pekerja di Program CFW :

a. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang terkena dampak bencana pandemi Covid-19 yang tinggal di wilayah lokasi sasaran CFW ; dan atau

b. Masyarakat yang kehilangan pekerjaan/berkurangnya penghasilan akibat dampak bencana pandemi Covid-19

c. Pencari nafkah utama keluarga laki-laki atau perempuan dan bukan anak di bawah umur

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tunai Cash For Work (CFW) :

a. Memberikan bantuan tunai dalam bentuk upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan

b. Memulihkanperekonomian masyarakat untuk mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi pasca pandemi Covid-19

c. Membantu pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19

d. Terpeliharanya dan berfungsinya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun Program KOTAKU maupun Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM)

Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 177/Kpts/M/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat Tahun Anggaran 2021 ,Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Program Kotaku, Khusus untuk CFW Mendapatkan Alokasi Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat Sebesar : Rp. **4.800.000.000** **di 16 Kelurahan**

No	Kelurahan	Jumlah Kelurahan CFW	Jumlah Dana (Rp.) CFW
1	AMPENAN UTARA	1	300.000.000
2	PEJARAKAN KARYA	1	300.000.000
3	CAKRANEGARA SELATAN	1	300.000.000
4	CAKRANEGARA UTARA	1	300.000.000
5	CILINAYA	1	300.000.000
6	MATARAM TIMUR	1	300.000.000
7	PAGUTAN TIMUR	1	300.000.000
8	PAGESANGAN BARAT	1	300.000.000
9	PAGESANGAN TIMUR	1	300.000.000
10	PAGUTAN BARAT	1	300.000.000
11	PAGUTAN	1	300.000.000
12	SELAGALAS	1	300.000.000
13	KARANG PULE	1	300.000.000
14	TANJUNG KARANG	1	300.000.000
15	MATARAM BARAT	1	300.000.000
16	MONJOK	1	300.000.000
		16	**4.800.000.000**

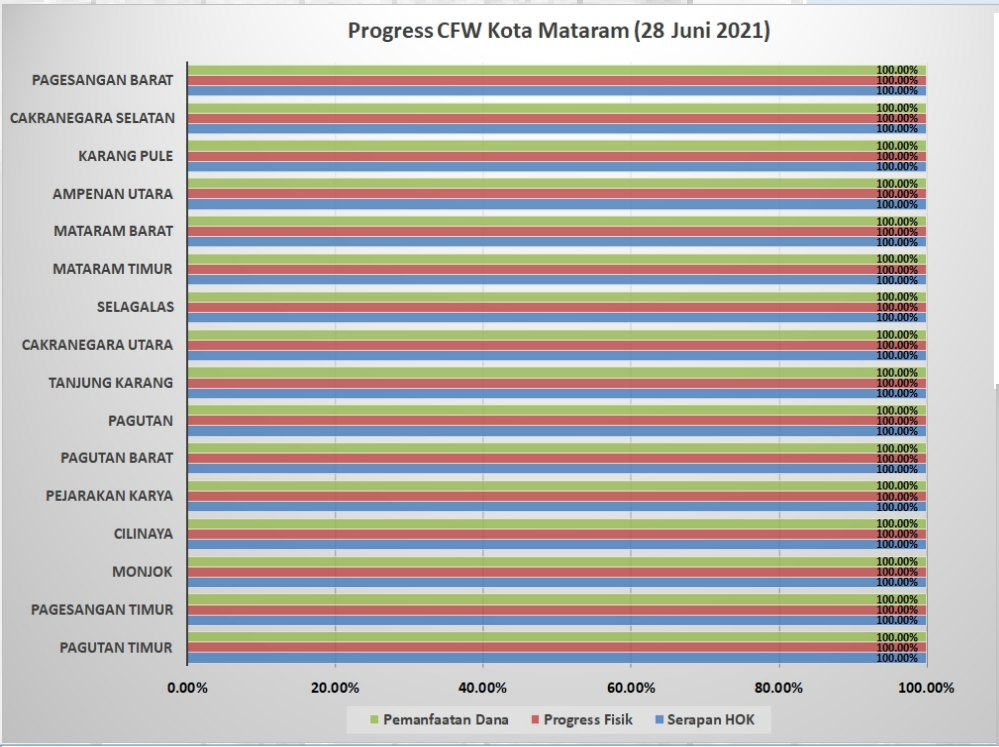

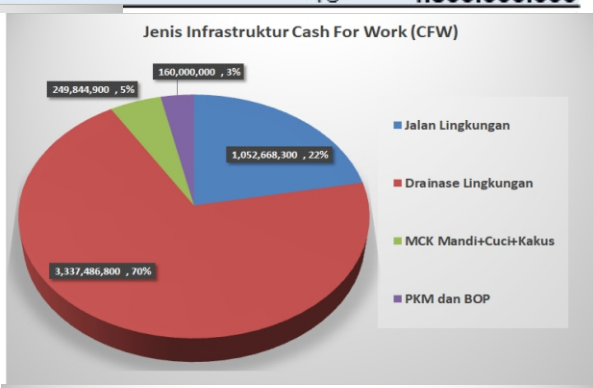

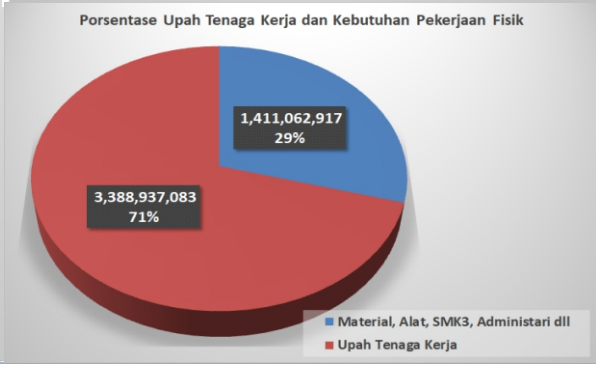

3

Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pemantauan Dampak Sosial dan Dampak Lingkungan Kegiatan CFW

Kegiatan persiapan pekerja sebelum memulai pekerjaan dengan melakukan protokol Covid-19 :

1. *Pengukuran suhu badan seluruh pekerja sebelum memulai pekerjaan*
2. *Memastikan seluruh pekerja menggunakan masker dan APD lengkap sebagai bentuk SMK-3*
3. *Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih sebelum memulai bekerja dan setelahnya*
4. *Absensi masuk pekerja dan menyiapkan alat kerja serta mengatur tenaga kerja sesuai rencana*

Upaya Pemantauan Dampak Lingkungan dan Sosial dalam pelaksanaan pekerjaan :

1. *Pembersihan di sekitar lokasi pekerjaan, pengangkatan sedimen dan pengumpulan sampah*
2. *Memastikan tdk terjadi genangan atau limpasan air di saluran akibat pekerjaan di badan saluran*
3. *Segera melakukan pengangkutan dan pembuangan sedimen maupun sampah yang terkumpul agar tidak terjadi pencemaran yang menyebabkan bau maupun penumpukan yang mengganggu warga yang melintasi jalan*
4. *Memasang rambu peringatan di ruas saluran yang sedang dikerjakan agar tidak mengganggu lalu lintas warga yang melintasi jalan di lokasi pekerjaan*

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pelaksanaan SMK-3

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pelaksanaan SMK-3

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pelaksanaan SMK-3

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 dan Pelaksanaan SMK-3

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Pemantauan Dampak Sosial dan Lingkungan

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Pemantauan Dampak Sosial dan Lingkungan

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Pemantauan Dampak Sosial dan Lingkungan

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH — Dokumentasi Pemantauan Dampak Sosial dan Lingkungan

Monitoring Pemda Ke Lokasi Kegiatan CFW Kotaku Mataram

Kunjungan dan Monitoring Pemda pada Rabu (21/4/2021) dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram dengan didampingi Sekretaris Dinas, Lurah Karang Pule dan Korkot Kotaku Mataram melihat dari dekat pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai/ *Cash For Work (CFW)* Kotaku di Kelurahan Karang Pule dalam rangka meninjau progres pelaksanaan pekerjaan oleh KSM. Dalam kesempatan ini Kepala Dinas Perkim H. Kemal Islam menyempatkan diri memberikan motivasi dan arahan kepada para pekerja dan KSM agar bisa bekerja dengan maksimal, mengutamakan prokes pencegahan Covid-19 selama bekerja dan menunjukkan kepedulian untuk menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Dalam kunjungan singkatnya, Kadis Perkim beserta rombongan meninjau ke lokasi pekerjaan perbaikan saluran di Lingkungan Karang Seme Kelurahan Karang Pule. H. Kemal Islam juga berkesempatan menyapa pekerja yang seluruhnya adalah merupakan warga Kelurahan Karang Pule yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga kehilangan pekerjaan, menurunnya penghasilan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Warga yang terlibat sebagai pekerja sangat antusias dengan dilaksanakannya program Padat Karya CFW ini, karena telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan keluarga, disamping menjadga kebersihan dan keberfungsian infrastruktu lingkungan yang ada.

Terjalinnya komunikasi dan koordinasi program Kotaku dengan Dinas Perkim sebagai leading sector pelaksanaan penanganan kumuh di Kota Mataram untuk membuka potensi kolaborasi program khususnya pekerjaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur lingkungan. Tentunya semua pihak berharap ke depan kegiatan padat karya seperti CFW ini dapat tetap dilaksanakan untuk membantu warga yang terdampak pandemi dan tetap terpeliharanya infrastruktur permukiman yang menjadi aset Kelurahan

Giat Forum PKP Kota Mataram yang Menggeliat

Rabu (9/6/2021) Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Nusa Tenggara Barat (BPPW NTB) Ika Sri Rejeki bersama Pemerintah Kota Mataram menginisiasi kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* Pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Mataram sebagai langkah awal dalam mengantisipasi munculnya permasalahan permukiman. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Mataram, Asisten II Kota Mataram, Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Kepala Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Wilayah Nusa Tenggara 1 (BP2P Wilayah NT-1), Kepala Bappeda Kota Mataram, Dinas PUPR Kota Mataram, Kadis Perkim Provinsi NTB, Kadis LH Provinsi NTB dan beberapa SKPD terkait.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah sebagai wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP yang nantinya dapat memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pembangunan PKP, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, pemeliharan, perbaikan dan tentunya pengendalian PKP.

Di akhir kegiatan, telah disepakati bersama yang akan mengetuai kegiatan Forum PKP ini adalah Komisi III DPRD Kota Mataram Abdul Rachman diharapkan dapat mengkoordinir agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik

Tak berselang lama. bertempat di Lesehan Green Asri Kota Mataram hari Selasa 29 Juni, Forum (Perumahan dan Kawasan Permukiman) PKP Kota Mataram yang baru saja terbentuk telah memulai bergeliat dengan melaksanakan pertemuan/koordinasi awal penyusunan rencana kerja yang melibatkan Pokja PKP dan Tim Kotaku Mataram. Hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Forum PKP Abd. Rachman yang sekaligus Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sekretaris Forum PKP Kurniawan Ashari yang juga merupakan Ketua REI Kota Mataram, Ketua Pokja PKP Lalu Agus S, Sekretaris Pokja PKP Parman dan Korkot Kotaku Mataram Hartatik beserta tim. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Ketua Forum PKP sangat mendukung serangkaian program pembangunan yang tengah dilaksanakan tahun ini di Kota Mataram, seperti pembangunan Rusunawa di Kelurahan Bintaro termasuk program yang dilaksanakan melalui Program Kotaku, baik itu CFW maupun DFAT, begitu juga dengan skala kawasan pasca bencana di Kelurahan Bertais dan Selagalas. Dalam kesempatan ini, Abd. Rachman membahas upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mataram dalam menyiapkan big data terkait permasalahan kumuh dan Forum PKP mempunyai keinginan yang kuat untuk mewujudkannya. "Karena bagaimanapun semua program baik pusat maupun daerah harus jelas data permasalahan yang diusulkan, maka kebutuhan akan big data terpadu yang akurat dan update menjadi keniscayaan, kita perjuangkan itu" pungkasnya

Di kesempatan terpisah, Korkot Kotaku Mataram, Hartatik menyampaikan bahwa di Program Kotaku telah memiliki data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal untuk menyiapkan big data terpadu yang dibutuhkan dalam penanganan kumuh di Kota Mataram. "Di tingkat Kelurahan ada namanya dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang difasilitasi oleh Kotaku sebagai dokumen perencanaan yang tidak hanya memuat 7 Aspek kumuh, namun juga perencanaan yang dibutuhkan, termasuk juga data baseline by name by addres yang bisa dijadikan data awal dalam menyiapkan program" ungkap Hartatik

Maka sangat diharapkan peran Forum PKP dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah dalam membangun Kota, berbagai program yang sedang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram ke pusat menjadi atensi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Salah satu yang menjadi pembahasan hangat yaitu usulan DAK Terintegrasi, dimana Pemerintah Kota Mataram mengusulkan penataan permukiman kumuh nelayan di Kelurahan Bintaro, namun ada beberapa permasalahan dan kendala yang harus diselesaikan, terutama kesiapan lahan. Disamping itu juga kesiapan Pemerintah Kota Mataram dalam mengusulkan Rumah Susun bagi warga yang tinggal di bantaran sungai, yang mana program tersebut sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram, seperti Penataan Terpadu Kawasan Baru Bintaro Ampenan.Selain itu, dengan antusias Forum PKP juga akan melihat peluang Kota Mataram untuk melanjutkan kegiatan skala kawasan di segmen sisi selatan DAS Jangkok yang berada di Kelurahan Dasan Agung Baru dan Kelurahan Banjar.

Poin poin pembahasan tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja yang akan disepakati oleh Forum PKP untuk menjalankan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2021 ini, adapun hasil pembahasan rencana kerja Forum PKP adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan Rutin Forum PKP setiap minggu I setiap bulan
2. Pembentukan Sekretariat Forum (Minggu I Juli 2021)
3. Monitoring Kegiatan Skala Kawasan Pasca Bencana (Minggu II setiap bulan yang dimulai pada bulan Juli 2021)
4. Monitoring Calon Lokasi DAK Terintegrasi 2022 (Minggu III Juli 2021)
5. Monitoring Kawasan RUSUN Bintaro (Minggu III Juli 2021)
6. Monitoring untuk persiapan lahan RUSUN Skala Kawasan Das Jangkok dan Pasca Bencana (Minggu IV Juli - Minggu II Agustus 2021)
7. Hearing dengan DPRD Kota Mataram (Minggu IV Juli 2021)
8. Sinkronisasi Data Kumuh Kota Mataram (Mulai Minggu IV Juli - September 2021)
9. Updating DATA (mulai Minggu IV Juli - September 2021)
10. Simulasi Pengurangan Kumuh Program KOTAKU dan Kolaborasi dengan Program yang bersumber dari APBD, APBN dan CSR (Agustus 2021)
11. Perhitungan Pengurangan Kumuh Tahun 2021 (Desember 2021)
12. Penerbitan SK Kumuh Kota Mataram Tahun 2021 (Desember 2021 - Januari 2022).

Mewujudkan Kota Inklusif Melalui Program KOTAKU-DFAT

- Terdapat berbagai macam definisi untuk 'Kota Inklusif' di tingkat internasional:
  - Kota ramah perempuan
  - Kota ramah anak dan lansia
  - Kota ramah penyandang disabilitas
  - Penyediaan layanan pokok bagi kalangan ekonomi lemah
- Namun pada prinsipnya, dapat dikatakan bahwa ***"sebuah kota inklusif adalah kota yang menghargai seluruh warga (semua orang), beserta kebutuhan mereka dengan setara"***[1], dan dengan demikian, semestinya mencakup seluruh golongan warga perkotaan yang diacu di atas

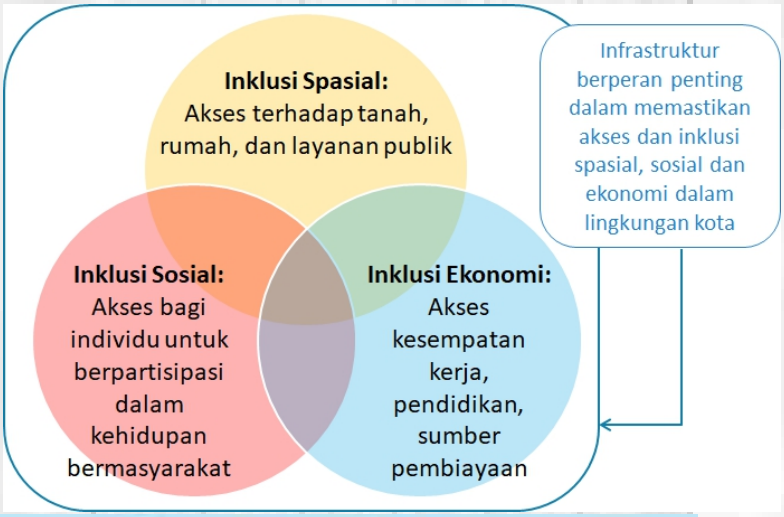

Jenis Kegiatan DFAT	Nilai	Volume	Satuan
Jalan	2,607,781,000	6,545	Meter
Drainase	1,878,797,000	6,419	Meter
SPAL	1,287,914,000	2,101	Meter
Komposter	165,890,000	101	Unit
Sumur Bor dan Tandon	787,423,000	4	Unit
MCK 1 Bilik	2,726,526,000	101	Unit
MCK 2 Bilik	406,957,000	7	Unit
MCK 3 Bilik	88,712,000	3	Unit

Pengertian GESI (Gender Equality and Social Inclusion) – Cakupan dan Prinsip

Kesetaraan Gender

Kondisi dimana **hak, tanggung jawab dan kesempatan yang sama bagi perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki**. Kesetaraan gender dapat dicapai pada saat **perilaku, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berbeda sama-sama dihargai dan dipertimbangkan.**

Inklusi Sosial

Proses untuk meningkatan kemampuan, membuka kesempatan dan mengembalikan martabat individu/kelompok yang sebelumnya dirugikan akibat atribut identitas seperti : **gender, disabilitas, suku dan ras minoritas yang menghambat keterlibatan dan partisipasi aktif dalam masyarakat.**

GESI mencakup Kedua Hal Besar ini secara tidak terpisahkan

Jadi Kesimpulannya, Fokus Perspektif GESI adalah...

...tindakan menyeimbangkan kembali relasi kuasa yang timpang, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan menghormati semua individu tanpa memandang identitas sosial mereka

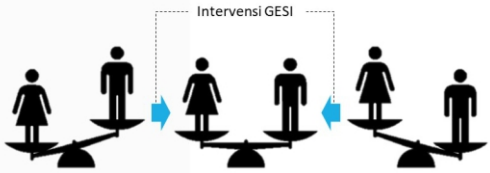

Beberapa pemahaman dasar:

- Ketidak setaraan GESI adalah **produk sosio-kultural yang dapat, dan perlu diubah**
- Ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud ini **dapat terjadi di semua bidang: ekonomi, sosial, politis, spasial, dll**
- Semua individu di sini **termasuk juga kelompok MBR, penyandang disabilitas, etnis minoritas, ataupun identitas lainnya**

NAMA KELURAHAN	NAMA KSM	NILAI BIAYA
KEKALIK JAYA	KALIBER	Rp 995,000,000
KEKALIK JAYA	SWAKARSA	Rp 995,000,000
KEBON SARI	HARMONI	Rp 995,000,000
KEBON SARI	LESTARI	Rp 995,000,000
SAYANG-SAYANG	RUNGKANG MAJU	Rp 655,837,000
SAYANG-SAYANG	RUNGKANG JANGKUK BANGKIT	Rp 807,083,000
SAYANG-SAYANG	LENDANG KELOR BERSATU	Rp 527,080,000
BABAKAN	NURUL HIDAYAH	Rp 995,000,000
BABAKAN	NURUL HUDA	Rp 995,000,000
BERTAIS	MAJU BERSAMA	Rp 995,000,000
BERTAIS	CENDANA	Rp 995,000,000
5 KELURAHAN	BOP BKM	Rp 50,000,000
TOTAL		Rp 10,000,000,000

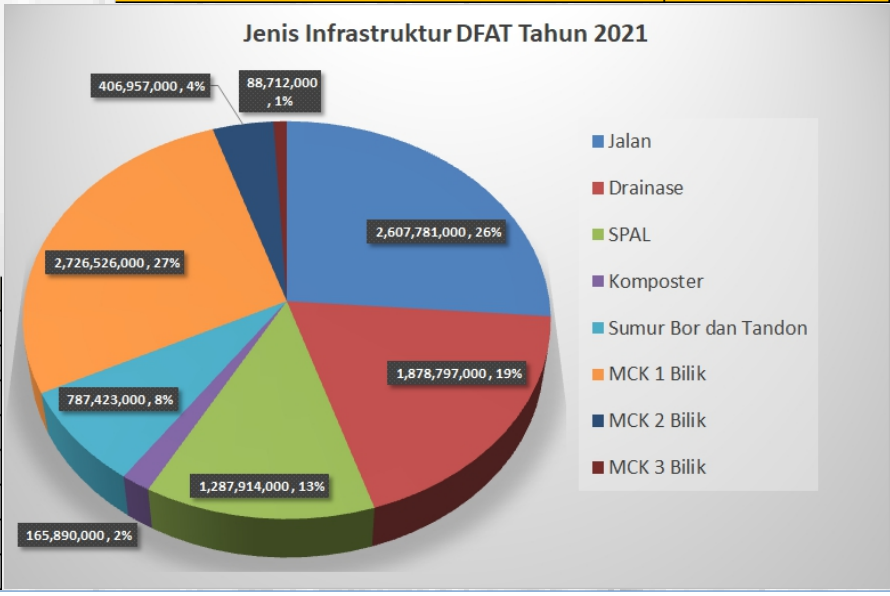

Penandatangan Kontrak (SPK) Program KOTAKU-DFAT Antara PPK Dengan BKM

Setelah melalui berbagai tahapan, mulai dari persiapan hingga perencanaan, maka tiba saatnya dilaksanakan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) BPM *Australian Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Program Kotaku yang diselenggarakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi NTB. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Juni 2021 yang bertempat di Aula PIP2B Jalan Majapahit Nomor 35 Mataram. Dalam acara penandatanganan SPK ini dihadiri oleh Kepala BPPW NTB, Kepala Satker PKP, PPK, Kepala Dinas Perkim Kota Mataram, Team Leader OSP-5 NTB, Korkot Kotaku Mataram, Lurah dan BKM 5 lokasi DFAT. Dalam sambutannya Kepala BPPW NTB menekankan kepada Lurah dan BKM yang mendapatkan program DFAT agar berupaya melaksanakan program dengan sebaik mungkin, memaksimalkan peran warga sekitar sebagai pekerja dengan pola padat karya dan meminta kerja sama semua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan DFT tersebut. Selanjutnya Kepala Dinas Perkim Kota Mataram berterima kasih dan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dalam upaya mengatasi permukiman kumuh, khususnya permasalahan *Watsan (Water and Sanitation)* melalui *Australian Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* Program Kotaku, dimana ada 5 Kelurahan yang mendapatkan program, yaitu Kelurahan Kebon Sari di Kecamatan Ampenan, Kelurahan Kekalik Jaya di Kecamatan Sekarbela, Kelurahan Sayang Sayang di Kecamatan Cakranegara, Kelurahan Babakan dan Kelurahan Bertais di Kecamatan Sandubaya. Tak lupa Kadis Perkim berpesan kepada Lurah dan BKM agar bersinergi untuk melaksanakan program sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dalam proposal dan DED di masing-masing Kelurahan.

Proses penandatangaan SPK dilaksanakan oleh PPK bersama 2 orang perwakilan BKM Kelurahan Sayang Sayanag dan Kelurahan Kekalik dengan didampingi oleh Lurah masing-masing. Dengan telah ditandatanganinya SPK tersebut, maka proses pelaksanaan Program Kotaku-DFAT dinyatakan telah bisa dimulai dengan masa SPK 5 bulan hingga 13 Nopember 2021.

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Semanggi Raya No. 05 Mataram, Telp. / Fax. 0370-6173223 e-Mail : bppw_ntb@pu.go.id

Nomor : UM.01.02-b/461 — Mataram, 14 Juni 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) gabungan
Hal : **Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) BPM *Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Program KOTAKU Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021**

Yth.
(Daftar terlampir)
di -
Tempat

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/*National Slum Upgrading Program* (NSUP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021, khususnya kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) kategori *Australian Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) yang tersebar di 5 (lima) Kelurahan-Kota Mataram. Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Pukul : 09.00 Wita s/d Selesai
Tempat : **Aula PIP2B Mataram**
Jalan Majapahit No.35h, Kekalik Jaya Kec. Sekarbela Kota Mataram (83115)

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkankan terima kasih.

Kepala Balai
Prasarana Permukiman Wilayah
Nusa Tenggara Barat

Ika Budhi Setiaji
NIP. 196409 199703 2 004

Konsep Desain Penataan Skala Kawasan Pasca Bencana Kota Mataram

Konsep Desain penataan kawasan Pasca Bencana antara lain dengan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan yang terdampak bencana gempa, pembukaan jalan baru, pelebaran akses jalan, sarana Ruang Terbuka Publik (RTP) yang sekaligus berfungsi sebagai area titik kumpul hingga penyediaan tandon air untuk mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana sebagai berikut :

a. Untuk menyambung lalu lintas yang terputus karena adanya Drainase Sekunder di lokasi tersebut pihak Konsultan Perencana merencanakan Jembatan Beton dengan Panjang 10 (sepuluh) meter dan panjang 15 (lima belas) meter dengan lebar 5 (lima) meter menggunkan konstruksi pondasi beton sumuran.

b. Pengelolaan limbah rumah tangga di sekitar lokasi kegiatan oleh masyarakat langsung dibuang ke saluran tanpa adanya bangunan pengolahan limbah sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan terutama air di saluran irigasi dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Untuk penanganan ini pemerintah, masyarakat maupun pihak peduli mengusulkan supaya adanya pengolahan air limbah tersebut dengan sistem IPAL Komunal.

c. Untuk mengusung Konsep Kelurahan Tangguh Bencana perlu adanya Ruang Terbuka Publik (RTP). Selain itu juga ada Penerangan Jalan Umum, sehingga dengan konsep itu diharapkan bisa merubah wajah kawasan Pasca Bencana menjadi Kawasan yang Asri, Bersih dan Nyaman sesuai dengan Visi Kota Mataram "Menuju Sandubaya Yang Layak Huni dan Tangguh Bencana"

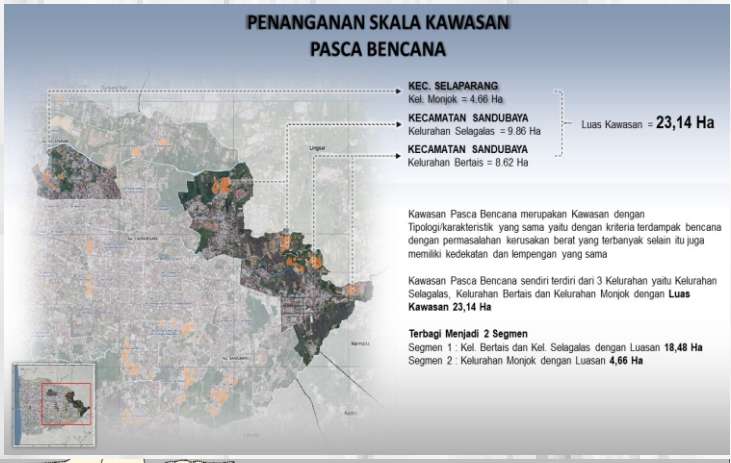

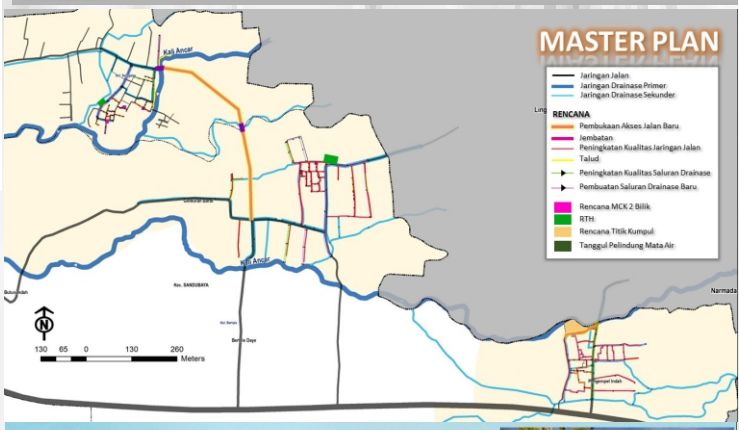

Galeri Foto Dokumentasi *Best Practice* Kegiatan *Cash For Work (CFW)*

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI/CASH FOR WORK (CFW)

Lokasi Kegiatan
Kelurahan Pagesangan Barat
Kec. Mataram, Kota Mataram
Prov. Nusa Tenggara Barat

Nama & Tahun
Pemeliharaan dan rehab drainase lingkungan
Volume Rencana : 2066.7 Meter (Proposal)

Sumber Pendanaan
BPM CFW KOTAKU 2021 : Rp. 192.932.000

TENAGA KERJA : 52 ORANG

STA 0-22, TIMBRAH

0 % | 50 % | 100 %

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI/CASH FOR WORK (CFW)

Lokasi Kegiatan
Kelurahan MATARAM BARAT
Kota MATARAM
Prov. Nusa Tenggara Barat

Nama & Tahun
Pemeliharaan dan rehab drainase lingkungan
Volume Rencana : 6148.5 Meter (Proposal)

Sumber Pendanaan
BPM CFW KOTAKU 2021 : Rp. 245.402.000

TENAGA KERJA : 63 ORANG

STA 50-100, Ruas 6 RT02 LING. KARANG MEDAIN BARAT

0 % | 50 % | 100 %

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI/CASH FOR WORK (CFW)

Lokasi Kegiatan
Kelurahan Pagesangan Timur
Kec. Mataram, Kota Mataram
Prov. Nusa Tenggara Barat
Titik Koordinat (-8, 60062;116,11476)

Nama & Tahun
Pemeliharaan dan Rehab Drainase
Tahun 2021
Volume Rencana : 2674 Meter (Proposal)

Sumber Pendanaan
BPM CFW KOTAKU 2021 : Rp. 247.974.200

TENAGA KERJA : 71 ORANG

Ruas 1 STA 7,7-30, RT 05 LK Gebang Baru

0 % | 50 % | 100 %

PROGRAM PADAT KARYA TUNAI/CASH FOR WORK (CFW)

Lokasi Kegiatan
Kelurahan KARANG PULE
Kota MATARAM
Prov. Nusa Tenggara Barat

Nama & Tahun
Pemeliharaan dan rehab MCK
Volume Rencana : 1 UNIT (Proposal)

Sumber Pendanaan
BPM CFW KOTAKU 2021 : Rp. 12.361.000

TENAGA KERJA : 53 ORANG

TITIK 1 LING. KARANG SEME

0 % | 50 % | 100 %